

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4
UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL**

**(Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan
Ungaran Barat Kabupaten Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1)
Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Nani Nur Asfiyah
1502036050

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Nani Nur Asfiah

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nani Nur Asfiah

NIM : 1502036050

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)”**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005



H. Amir Tajrid, M. Ag
NIP. 197204202003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Nani Nur Asfiah**

NIM : 1502036050

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: H. Amir Tajrid, M.Ag.
Anggota/Penguji 3	: Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Anggota/Penguji 4	: Dr. Mahsun, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,67 (tiga koma enam puluh tujuh)** / **B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ¹ ١٦٨

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah: 168)²

¹ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2: 168)

² Kementerian Agama RI, *AR-RAKHIM Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), Hlm. 25

PERSEMBAHAN

Terima kasih dan persembahan rasa syukur kepada Allah SWT, dengan karunia dan kasih sayang saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:

Ibu Khomsiah dan Bapak Sudarsono (alm.)

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan semua pengobanan kalian. Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun material. Selalu ada saat penulis butuhkan, selalu memberikan ketenangan ketentraman disetiap helaan nafas. Tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang yang tulus luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.

Mbak Nani Aswati, Mas Herdi yanto dan Mas Imam Yulianto

Yang selalu memberikan dukungan serta tak henti dalam mencurahkan kasih sayang kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusan, serta selalu dalam lindunganNya.

Mawapala

Yang selalu memberikan ruang kebersamaan yang hangat dan selalu memberikan kenyamanan serta pengalaman yang tidak penulis dapatkan diruang kelas perkuliah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pikiran-pikiran orang-orang lain., kecuali atas informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2020

Deklarator



Nani Nur Asfiyah
NIM: 1502036020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Swyari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menti Agama dan Menti Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Žukira
2.	يَذْهَبُ	Yažhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ....ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ....و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta’ marbūtah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

E. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفرود	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

F. Ya’ nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Kecamatan Ungaran Barat merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Semarang, yang mana di Kecamatan tersebut memiliki sektor perekonomian dalam hal industri rumah tangga. Industri yang cukup terkenal ialah produk keripik-keripik, tumpi, dan makanan sejenis lainnya. Dari banyaknya pelaku usaha tersebut, namun masih sedikit pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada produknya, hal tersebut tidak mencerminkan dengan peraturan yang telah ada mengenai produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Peraturan itu telah disahkan sejak tahun 2014, namun dalam implementasinya dikalangan produsen belum banyak yang menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah Bagaimana implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk industri rumah tangga di kecamatan Ungaran Barat? Bagaimana pengawasan Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk industri rumah tangga tanpa label halal di kecamatan Ungaran Barat?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari obyek penelitian yang sebenarnya, dengan bentuk penelitian hukum normatif-empiris yaitu dengan penggabungan antara hukum normatif dengan adanya unsur empiris. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah yang *Pertama* Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat belum berjalan dalam pengaplikasiannya dikalangan para produsen. Karena beberapa produsen masih beranggapan bahwa bersertifikat halal belum menjadi kebutuhan mendesak terhadap produknya. *Kedua* Pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH pada produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat dapat dikatakan belum berjalan. Karena, saat ini Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah yang mengemban tugas sebagai BPJPH di wilayah Jawa Tengah belum pernah mengeluarkan sertifikat halal untuk suatu produk. *Ketiga* dalam perspektif hukum Islam terhadap jual beli produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat yang tidak mencantumkan label halal adalah termasuk jual beli yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan sudah terpenuhi rukun-rukunnya yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang serta jual beli ini dilakukan atas dasar saling percaya antara penjual dan pembeli, namun tidak dianjurkan karena melanggar ketentuan Undang-undang.

Kata Kunci: UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, Jual-Beli P-IRT

KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tidak terhingga. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Dalam kehidupan bermasyarakat maka tidak akan terlepas dari praktik bermu'amalah diantaranya adalah Jual-beli. Jual-beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu transaksi jual-beli yang terjadi di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yaitu mengenai jual-beli produk industri rumah tangga.

Kecamatan Ungaran Barat merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Semarang, yang mana di Kecamatan tersebut memiliki sector perekonomian dalam hal industri rumah tangga. Industri yang cukup terkenal ialah produk keripik-keripik, tumpi, dan makanan sejenis lainnya. Dari banyaknya pelaku usaha tersebut, namun masih sedikit pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada produknya, hal tersebut tidak mencerminkan dengan peraturan yang telah ada mengenai produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Peraturan itu telah disahkan sejak tahun 2014, namun dalam implementasinya dikalangan produsen belum banyak yang menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut.

Akhirnya, penelitian skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)”**

selesai tanpa kendala apapun. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan yang sangat besar bagi peneliti. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada: Dosen Pembimbing I Bapak Drs. Sahidin, M.Si dan Bapak H. Amir Tajrid, M. Ag

selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi. Kepala jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Supangat, M.Ag dan Sekretaris jurusan H. Amir Tajrid, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Dr. Mohamad Arja' Imroni, M.Ag. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

Terimakasih juga terucap kepada kedua orang tuaku tercinta, kakak-kakakku dan seluruh keluarga besarku, kalianlah semangatku, kalianlah yang tak pernah lelah memberikan dukungan serta kasih sayang yang tak akan pernah aku dapatkan dari yang lainnya. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah 2015 umumnya serta khususnya kelas HES-B yang diisi oleh manusia bervariasi dan konyol yang sudah seperti keluarga sendiri dan sekarang sudah banyak yang menghilang karena sudah menemukan suksesnya masing-masing. Teman-temanku KKN POSKO 03 Kelurahan Mangkang Wetan, terimakasih sudah memberikan kesan terbaik selama 45 hari kita, yang telah menjadikan kita keluarga tanpa KK, semoga kebaikan dan kesuksesan selalu menyertai kalian semua.

Terimakasih kepada Keluarga besar Mawapala yang telah memberikanku keluarga yang sangat luar biasa yang selalu memberikan kenyamanan dan kehangatan selama ini. Semoga jaya selalu. Terimakasih kepada angkatanku tersayang Pasa Adhirajasa yang telah memberikan ukiran cerita tak terlupakan. Terimakasih kepada jajaran pengurus Mawapala periode 2020, semoga tetap amanah dalam menjalankan roda organisasi tercinta kita, dan semoga tetap lancar dalam setiap program kerja yang tengah dijalankan.

Terimakasih juga terucap kepada sahabat-sahabatku, Ayu Dwi Raecha, Diah Ariful Hikmah, dan Novi Lestari, yang selalu ada disetiap keluhan maupun kebahagiaan yang aku curahkan selama ini. Terimakasih kepada temanku tersayang Inayatun Najikah yang selalu sabar menghadapi semua kesulitanku. Terimakasih kepada semua orang yang selalu menanyakan kapan saya wisuda? Sudah bab berapa? Dan pertanyaan-pertanyaan menyebarkan lainnya. dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal'alamîn.

Semarang, Mei 2020

Penulis,

Nani Nur Asfiah
NIM:1502036050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasa	18
BAB II JUAL BELI DAN JAMINAN PRODUK HALAL	20
A. Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Syarat Sah Jual Beli.....	25
5. Jual Beli Yang Dilarang	27
B. Produk Industri Rumah Tangga.....	31
1. Pengertian Produk Industri Rumah Tangga	31
2. Pengemasan Produk.....	31
C. Jaminan Produk Halal.....	32
1. Pengertian Jaminan Produk Halal	32
2. Pengertian Sertifikasi Halal	32
3. Landasan Hukum Sertifikasi Halal.....	33
D. Badan Pengawas Jaminan Produk Halal	36
1. Pengertian BPJPH	36
E. Pengawasan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	36
F. Proses Produk Halal	37
G. Pelaku Usaha	37
1. Pengertian Pelaku Usaha	37
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	38
BAB III IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 33	
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN	
PENGAWASANNYA DI KECAMATAN UNGARAN BARAT	
KABUPATEN SEMARANG	42
A. Gambaran Umum Kecamatan Ungaran Barat.....	42

1. Letak Geografis Kecamatan Ungaran Barat.....	42
2. Kondisi Demografi	44
B. Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat	45
1. Proses/Alur Penerbitan Sertifikasi Halal	48
2. Masa Berlaku Sertifikasi Halal.....	49
3. Sanksi Bagi Yang Melanggar	50
4. Pengawasan BPJPH Terhadap Para Pelaku Usaha Produk Industri Rumah Tangga.....	51
5. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dikalangan Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat.....	52
C. Praktik Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat.....	55

BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMER 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PENGAWASANNYA PADA PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN UNGARAN BARAT	62
.....	

A. Analisis Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat	62
B. Analisis Pengawasan Badan Pengawas Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat.....	71
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal Di Kecamatan Ungaran Barat	75
.....	
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
C. Penutup.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim semakin memerhatikan setiap hal terhadap masyarakatnya, baik dari apa yang dipakai dan apa yang dimakan. Terkhusus tentang makanan yang setiap individu pasti membutuhkan makanan sebagai sumber energi tubuhnya. Tanpa makanan, asupan kebutuhan tubuh tidak akan terpenuhi, oleh sebab itu negara sangat memerhatikan terhadap kehalalan dari setiap makanan yang kita makan, sehingga pemerintah mengesahkan undang-undang yang berhubungan dengan kehalalan suatu produk maupun jasa.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan undang-undang tentang jaminan produk halal yang mana pada undang-undang tersebut mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang kehalalan suatu produk. Dan dalam undang-undang tersebut telah disebutkan bahwa barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.³ Dari peraturan tersebut secara otomatis setiap pelaku usaha sudah menjadi kewajiban untuk menjalankan peraturan tersebut. Baik pelaku usaha kecil menengah seperti para pelaku usaha produk industri rumah tangga ataupun perusahaan-perusahaan besar.

Kecamatan Ungaran Barat adalah kecamatan dimana terdiri dari beberapa desa yang mana disetiap desa memiliki pelaku usaha yang bergerak

³ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4

dalam bidang inddustri rumah tangga. Beberapa contoh produk industri rumah tangga yang diproduksi oleh para pelaku usaha adalah seperti rempeyek, keripik tempe, keripik pisang, dan masih banyak lagi.

Jika dilihat dari rutinitas keseharian yang dilakukan oleh manusia, yang menjadi salah satu pemenuhan bukanlah hanya makanan pokok saja. Zaman sekarang camilan atau makanan ringan merupakan salah satu makanan yang wajib tersedia di setiap rumah, karena berfungsi sebagai makanan sampingan ketika melakukan kegiatan santai sehari-hari ketika di rumah. Namun, jika dilihat lagi dari segi konsumsi setiap individu atau kelompok, camilan atau makanan ringan ternyata tidak hanya kebutuhan ketika di rumah saja. Di kantor, kampus, taman, dan tempat-tempat yang memiliki nuansa nyaman untuk bersantai pastilah menjadi sasaran untuk hanya sekedar berbincang santai, dan di sinilah camilan berperan sebagai pelengkap.

Realita di lapangan mengenai implementasi dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang terjadi di Kecamatan Ungaran Barat setelah penulis melakukan survey lapangan di salah satu produsen dari produk industri rumah tangga belum mendaftarkan produknya agar bersertifikat halal. Bahkan produk yang diproduksi belum memiliki label produk sendiri. Label yang digunakan merupakan label yang didapat dari distributornya.⁴

⁴ Istirokhah, wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga, (Kecamatan Ungaran Barat: 15 Oktober 2019)

Banyaknya produsen yang menekuni bidang industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat ini sudah seharusnya memperhatikan produk-produk yang dihasilkan baik dari segi pengemasan, label, maupun keamanan-keamanan lainnya sebagai rasa tanggungjawab dari para pelaku usaha dalam melindungi hak para konsumen. Namun dari masing-masing produk industri yang diolah oleh para produsen ternyata masih banyak yang belum mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Masih banyak produk-produk yang dijual bahkan tanpa label yang mana fungsi label pada kemasan merupakan sebagai informasi yang menjadi hak setiap konsumen. Produk yang dijual dikalangan masyarakat hanya menggunakan bungkus plastik tanpa adanya label keterangan produk.

Padahal makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan konsumen. Mengonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.⁵

Dari beberapa aspek tentang efek dari makanan yang kurang sehat, pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan,

⁵ Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*, (Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya, 2009), hlm. 19

terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsinya. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Akses informasi adalah bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen yang di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum sebagaimana tujuan yang digariskan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Sudah menjadi keharusan bagi produsen untuk mencantumkan komposisi bahan pada produk olahannya khususnya produk olahan yang dikemas, akan tetapi sangat berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangan. Produsen masih tidak menghiraukan apa yang seharusnya menjadi hak konsumen yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya terdapat aturan mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Adapun yang menjadi hak-hak konsumen pada Pada pasal 4 poin a dan c yang berbunyi: poin (a) *“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”*

poin (c) *“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”*

dan yang termuat pada pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha pada poin b yang berbunyi:

*“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”*⁶

Selain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Beberapa Pasal di dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) juga telah menjelaskan bahwa makanan yang diperjualbelikan dalam bentuk kemasan haruslah mencantumkan beberapa ketentuan yang memuat informasi untuk para konsumen. Diantaranya terdapat pada pasal berikut⁷:

- 1) Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- 2) Pada Pasal 97 ayat (3) pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a) Nama barang;

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

- b) Daftar bahan yang digunakan;
- c) Berar bersih atau isi bersih;
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f) Tanggal dan kode produksi;
- g) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- h) Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
- i) Asal usul bahan pangan tertentu.

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradia pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁸

Apabila dikaji menurut pandangan Islam, pencantuman label halal merupakan salah satu hal yang harus dilakukan demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan bisa diartikan keselamatan yang mencakup semua pihak sedangkan kemafsadatan adalah kerusakan yang dapat terjadi. Dalam hal jual beli ini, kemaslahatan diperlukan karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Hukum Islam mengatur segala macam bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan

⁸ Pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

oleh pihak lainnya. Jadi, segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam.

Apabila dalam barang yang akan diperjualbelikan terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual) maka diwajibkan dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.⁹ Jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah tapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa.¹⁰ Dalam jual beli harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Diantara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, baik penukar maupun barang yang dijual. Syarat-syarat barang yang diakadkan disyaratkan enam hal, yaitu:

- 1) Kesucian barang
- 2) Kemanfaatan barang
- 3) Kepemilikan orang yang berakad atas barang
- 4) Kemampuan untuk menyerahkan barang
- 5) Pengetahuan tentang barang
- 6) Masing-masing dari barang yang dijual dan penukar harus diketahui.

Apabila keduanya tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak

⁹ Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1994), hlm. 55

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 89

diketahui maka jual beli tidak sah kerna didalamnya terdapat ketidakjelasan.

- 7) Untuk mengetahui barang yang dijual cukup dengan melihatnya, meskipun kuantitas tidak diketahui, sebagaimana dalam jual beli barang tanpa ditimbang/ditakar. Adapun barang yang ada dalam timbangan, kuantitas dan ciri-cirinya harus diketahui oleh kedua orang yang berakad.
- 8) Sementara penukar wajib diketahui ciri-ciri, kuantitas, dan batas waktunya.¹¹
- 9) Telah diterimanya barang yang dijual¹²

Sebelum membeli, seorang konsumen tentu akan mencari informasi tentang berbagai aspek dari suatu barang atau produk. Kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Maka dari itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen.¹³ Dikarenakan informasi yang jelas merupakan salah satu langkah awal bagi konsumen sebagai bahan pertimbangan bahwa produk yang akan dibelinya merupakan produk yang layak untuk dikonsumsi, dan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan pula mengenai kehalalan suatu produk, karena dengan adanya label halal yang tercantum pada suatu produk tersebut akan lebih meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut benar-benar aman dan sehat untuk dikonsumsi.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqqih Sunnah* jilid V, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 18

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqqih Sunnah* jilid V, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 8

¹³ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), hlm. 197

Dari banyaknya peraturan-peraturan yang telah penulis sebutkan, dapat disimpulkan bahwa memperhatikan kelayakan dari suatu produk baik dari segi fisik, rasa maupun berbagai hal lainnya dari suatu produk merupakan suatu kewajiban untuk selalu diperhatikan oleh setiap pelaku usaha. Karena dengan tidak memperhatikan segala aspek keamanan merupakan suatu kesalahan dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baik dalam islam maupun peraturan Negara.

Dalam uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga (Study Kasus Kecamatan Ungaran Barat Dalam Dalam Perpektif Hukum Islam)”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk industri rumah tangga di kecamatan Ungaran Barat?
2. Bagaimana pengawasan Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli produk industri rumah tangga tanpa label halal di kecamatan Ungaran Barat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk industri rumah tangga di kecamatan Ungaran Barat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dari Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap produk industri rumah tangga tanpa label halal di kecamatan Ungaran Barat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setelah dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dihasilkan, yang mana manfaat tersebut tidak hanya berguna bagi penulis namun juga dapat berguna bagi masyarakat. Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara umum, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam bidang muamalah khususnya mengenai jual beli produk industri rumah tangga yang belum mencantumkan label halal pada produk olahannya agar sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia.
2. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

E. TELAAH PUSTAKA

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹⁴

Dalam rancangan skripsi ini, penulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap implementasi undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap jual beli produk industri rumah tangga (study kasus kecamatan ungaran barat dalam dalam perpspektif hukum islam), yang mana dalam penelitian sebelumnya memang telah ada yang membahas mengenai produk makanan olahan, tetapi ada perbedaan mendasar yakni pada maksud penelitian dan tempat penelitian serta objek yang dibahas. Adapun penelitian terdahulu yang penulis rangkum sebagai berikut:

Skripsi Eka Fasya Agustina yang berjudul: *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)”*. Skripsi ini membahas tentang mengapa produk olahan tanpa komposisi bahan masih beredar di pasar sayung serta bagaimana analisi hukum Islam terhadap jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No. 8 Tahun 1999.¹⁵

¹⁴ Tim penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

¹⁵ Eka Fasya Agustina yang berjudul: *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)”* Skripsi Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018.

Skripsi Muhammad Kholiq yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Prduk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)*”. Skripsi ini membahas tentang hukum makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal dari MUI dan juga faktor faktor yang mempengaruhi makanan dan minuman olahan pada IKM di kota Semarang belum bersertifikat halal.¹⁶

Skripsi Ricky Prabowo yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung)*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal di LPPOM MUI provinsi lampung, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap legalitas sertifikasi halal¹⁷

Skripsi Faridatun Nikmah yang berjudul “*Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan (Studi Di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama’ Indonesia Jawa Tengah)*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal produk makanan minuman olahan oleh LP POM MUI Jawa Tengah, dan

¹⁶Muhammad Kholiq, *Studi Analisis Terhadap Prduk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2010

¹⁷ Ricky Prabowo yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung)*” Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung , 2018

bagaimana sosialisasi terhadap produsen tentang sertifikasi halal produk makanan minuman olahan oleh LP POM MUI Jawa Tengah.¹⁸

Jurnal penelitian Ahkam: Juli 2015 Vol. XV, No. 2 *Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*, Oleh Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj¹⁹

Jurnal Penelitian UNRAM, Februari 2014 ISSN 0854-0098 Vol. 18 No.1, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Oleh Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Dwi Martini.²⁰

Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai serifikasi halal suatu produk. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian-penelitian di atas adalah penelitian yang penulis buat berfokus pada mengapa masih banyak para pelaku usaha produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat yang belum mencantumkan label halal pada produk olahannya, dan bagaimana transaksi yang jika dilihat dari sisi hukum islam belum memenuhi syarat sah jual beli, oleh sebab itu menurut

peneliti hal tersebut dapat diangkat sebagi bahan untuk dilakukannya sebuah penelitian.

¹⁸ Faridatun Nikmah yang berjudul “*Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan (Studi Di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama’ Indonesia Jawa Tengah)*” Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015

¹⁹ Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj, *Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*, penelitian Ahkam: Juli 2015 Vol. XV, No. 2

²⁰ Kurniawan. dkk, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian UNRAM, Februari 2014 ISSN 0854-0098 Vol. 18 No.1

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu:

Penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitian adalah norma hukum. Penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan obyek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan yuridis empiris yaitu bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²² Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut biasanya mencakup wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya.²³ Dengan kata lain, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan atau diubah dalam bentuk angka. Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti harus mengkaji secara logis terhadap peraturan yang relevan dengan praktek membuat desain grafis berdasarkan hukum Islam.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016), Hlm. 12

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 31

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 131

3. Sumber data:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama obyek penelitian, dalam hal ini data dapat berupa hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari dan kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
 - (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Pada penelitian ini adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
 - (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel, jurnal, serta tulisan ilmiah hukum.²⁴ Artikel, jurnal, serta tulisan ilmiah hukum yang penulis gunakan adalah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, yaitu berkaitan dengan jaminan produk halal, tentang pangan, dan tentang hukum perlindungan konsumen.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32

- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²⁵

4. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis langsung mengamati produk makanan yang diproduksi oleh para produsen P-IRT di Kecamatan Ungaran Barat. Dalam hal ini penulis menggunakan metode observasi non partisipatoir karena penulis tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan dan aktivitas para produsen, dan hanya sebagai pengamat pasif dengan melihat, mengamati, dan mendengarkan semua aktivitas serta mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.²⁶

2. Wawancara

Wawancara ini merupakan metode untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab kepada pihak terkait tentang seputar penelitian. Penulis bertanya langsung kepada produsen dan badan

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 185

²⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 237

pemerintahan terkait dengan menggunakan pokok-pokok wawancara sebagai pedoman supaya wawancara dapat terarah.

3. Dokumentasi

Bahan-bahan yang diteliti dari hasil wawancara dan observasi dijadikan foto saat melakukan observasi dan didokumentasi dalam bentuk rekaman saat wawancara.²⁷

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu dianalisis kembali dengan menggunakan metode deskriptif, yakni dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada.²⁸ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data kemudian menganalisisnya dengan akad jual beli dan Undang-undang dengan hadis-hadis dan ayat suci Al-Qur'an yang berhubungan dengan sertifikasi halal pada produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat.

Adapun langkah-langkah analisis data yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan saat berlangsungnya penelitian terhadap pelaksanaan jual beli produk industri rumah tangga di kecamatan Ungaran Barat yang belum mencantumkan label halal pada kemasan produk.

²⁷ Lexy Jdmoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 55

²⁸ Suharsini ari Kunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 191

- b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan yang diperlukan guna memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat singkat padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduksi,²⁹ yaitu menyampaikan data yang bersifat umum, dalam hal ini tentang teori-teori jual beli secara umum, kemudian menguraikan data tentang jual beli yang bersifat khusus, yaitu tentang praktek jual beli produk industri rumah tangga di kecamatan Ungaran Barat yang belum mencantumkan label halal pada kemasan produk yang selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan pengantar yang memberi gambaran secara umum tentang permasalahan dengan mengemukakan latar

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 36

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, analisis data serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori yang mendasari penelitian. Bab ini berisi teori tentang tinjauan umum jual beli produk industri rumah tangga dan hak-hak konsumen dalam hukum Islam meliputi ruang lingkup jual beli dan perlindungan hak-hak konsumen.

Bab ketiga berisi tentang praktek jual beli produk industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label halal di Kecamatan Ungaran Barat. Pada bab ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab keempat berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label halal dan kemudian menganalisa praktek pelaksanaan jual beli produk industri rumah tangga dalam hal perlindungan konsumen.

Bab kelima adalah bab penutup, bab ini berisi kesimpulan, pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, kemudian disertai dengan saran-saran serta penutup.

BAB II

JUAL BELI DAN JAMINAN PRODUK HALAL

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual beli

Jual-beli atau perdagangan (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata الْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: أَشْرَاءُ (beli). Dengan demikian kata: الْبَيْعُ berarti kata “jual” dan sekaligus juga kata berarti kata “beli”.³⁰

Secara istilah (terminology) yang dimaksud jual-beli adalah sebagai berikut:

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ

“Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara”

مُقَا بَا لَهُ مَا لِي قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara”

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 113

مُقَا بَلَّةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوفِيهِ

“Tukar-menukar benda dengan dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan)”

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونُ فِيهِ

“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.³¹

2. Dasar hukum jual-beli

Jual-beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan beberapa sunnah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual-beli, antara lain:

Surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³² ٢٧٥

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..”³³

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm. 67-68

³² Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275

³³ Kementerian Agama RI, *AR-RAKHIM Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), Hlm. 29

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ³⁴

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

3. Rukun dan syarat jual-beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.³⁵

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang³⁶

³⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Marom Min Adillaat Al-Ahkam*, (Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2009), Hlm. 157

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2014), Hlm. 6

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 118

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual-beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang berakad itu masih mumayiz, maka jual-beli tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.³⁷

b. Syarat-syarat yang terkait ijab qabul

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Hlm. 72-73

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual-beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual-beli maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang telah dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang melakukan akad yang disebut di atas.
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual-beli tidak sah.
 - 3) Ijab dan qabul itu harus dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual-beli hadir dan membicarakan topic yang sama.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (ma'uqud 'alaih)
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang, tidak boleh diperjual-belikan.
 - 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
 - 5) Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.³⁸
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama fiqh mengemukakan yang menjadi syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
 - 3) Apabila jual-beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.³⁹
4. Syarat sah jual-beli
- Syarat-syarat sah jual-beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.
- a. Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada disetiap jenis jual-beli agar transaksi itu dianggap sah secara syara', dimaksud dengan

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2014), Hlm. 57

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 124

syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi yang harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, keugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.⁴⁰

- b. Syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual-beli saja, sebagaimana berikut:
 - 1) Menyangkut jual-beli barang yang dapat berpindah, yaitu jika seseorang ingin menjual lagi barang yang dapat berpindah yang telah dibelinya maka disyaratkan sahnyanya penjualan itu.
 - 2) Mengetahui harga awal jika jual-beli itu berupa sistem bagi hasil atau pemberian wewenang, atau juga penitipan, serta koperasi.
 - 3) Menyangkut jual-beli mata uang, harus diterimanya uang yang ditukar sebelum berpisah.
 - 4) Menyangkut jual-beli salam, terpenuhinya syarat-syarat sah jual-beli salam.
 - 5) Menyangkut jual-beli barang-barang riba, disyaratkan adanya persamaan jumlah antara kedua mata uang dan keharusan menghindari kemungkinan terjadinya riba.
 - 6) Menyangkut jual-beli barang yang berbentuk piutang, barang yang berbentuk piutang dan belum diterima, atau belum ada di tangan,

⁴⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2007), Hlm.

tidak boleh dijual ke orang lain, namun piutang disyaratkan harus ada di tangan terlebih dahulu baru menjualnya ke orang lain.⁴¹

5. Jual-beli yang dilarang dalam Islam

Mencari rezeki dengan cara-cara yang dibolehkan terutama dengan cara jual-beli dapat mendatangkan banyak kebaikan. Tetapi dalam jual-beli terdapat batasan-batasan yang ditetapkan syariat, yakni kaum muslimin harus menjauhi muamalah-muamalah yang diharamkan dan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Rasulullah saw telah melarang berbagai macam jual-beli karena terdapat cara-cara yang buruk sehingga dapat mendatangkan kemudharatan bagi umat manusia.⁴² Cara jual-beli yang dilarang tersebut antara lain:

a. Jual-beli yang dapat menjauhkan diri dari ibadah

Maksudnya adalah ketika waktu ibadah pedagang malah menyibukkan diri dengan jual-beli sehingga mengakhirkan sholat berjamaah di masjid. Dia kehilangan waktu shalat atau sengaja mengakhirkannya, maka jual-beli yang dilakukannya dilarang. Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ

فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁴³

“9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹⁰ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁴⁴

b. Menjual barang-barang yang diharamkan

Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harga (pembayaran) dari sesuatu tersebut, yakni menjual barang-barang yang dilarang untuk dijual. Rasulullah Saw telah melarang untuk menjual bangkai, arak, babi, dan patung. Seseorang yang menjual bangkai, yaitu daging binatang yang tiak disembelih sesuai syar'I maka ia termasuk orang yang menjual bangkai dan mendapat harga pembayaran yang haram.⁴⁵

c. Menjual sesuatu yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah

⁴³ Al-Qur'an Surah *al-Jumu'ah*: 9-10

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Ar-Rakhim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), Hlm. 554

⁴⁵ Syeh Abdurrahman as-Sa'di, Syeh Abdul 'Aziz bin Baaz, Syeh Shalih al-'Utsaimin, Syeh Shalih al-Fauzan, *Fiqh Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), Hlm. 130

tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.⁴⁶

d. Jual-beli 'Inah

Jual-beli 'Inah pada prinsipnya merupakan bagian dari diskusi tentang larangan dilakukannya dua jual-beli dalam satu jual-beli (bai'atani fi bai'ah wahidah). Secara konseptual, ulama menghubungkan jual-beli 'inah dengan konsep riba (terutama riba qard). Secara proses, kebanyakan ulama menempatkan jual-beli 'inah dalam upaya hilah (hilah ribawiyah).

Jual-beli 'inah digunakan sebagai term yang menunjukkan terjadinya dua jual-beli atas barang yang samadengan dua harga: harga tunai dan harga tangguh (atau angsur [dikenal denganal-bai' bi al-taqsith]).⁴⁷

e. Jual-beli *Najasy*

yang dimaksud dengan najasy adalah menawar suatu barang dagangan dengan menambah harga secara terbuka, ketika datang seorang pembeli dia menawar lebih tinggi barang itu padahal dia tidak ingin membelinya. Tujuannya adalah agar pembeli tersebut membeli barang itu lebih tinggi lagi. Barang siapa menawar barang dagangan agar

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Hlm. 82-83

⁴⁷ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Hlm. 186

pembeli mengikutinya dengan membayar lebih mahal, maka orang tersebut disebut najasy (pelaku najasy).⁴⁸

f. Jual-beli yang dilarang karena riba

yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ⁴⁹

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.”*⁵⁰

g. Jual-beli Tadlis

Yang dimaksud jual beli tadlis merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dengan yang jelek, adanya unsur sumpah.⁵¹

h. Jual-beli secara gharar

⁴⁸ Syeh Abdurrahman as-Sa'di, Syeh Abdul 'Aziz bin Baaz, Syeh Shalih al-'Utsaimin, Syeh Shalih al-Fauzan, *Fiqh Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), Hlm. 136

⁴⁹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *AR-RAKHIM Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), Hlm. 47

⁵¹ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), Hlm. 120

Setiap akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan adanya keraguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Salah satu contohnya adalah barang yang diperjualbelikan itu tidak bisa diserahkan pada waktu akad, belum bisa dipastikan baik kualitas maupun kuantitas barang yang diperjualbelikan, dan lain sebagainya.⁵²

B. PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA

1. Pengertian produk industri rumah tangga

Industri rumah tangga adalah industri dengan tenaga kerja terdiri dari satu sampai empat orang, yang mana tenaga kerja tersebut bisa berasal dari anggota keluarga. Industri ini memiliki modal sangat terbatas, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Karena skalanya yang kecil, kegiatan produksi bisa dilakukan di rumah. Bentuknya bisa berupa industri kerajinan tangan, tahu tempe, atau makanan ringan/camilan.⁵³

Camilan atau snack merupakan makanan yang tidak resmi, bukan merupakan makanan besar. Orang sering menyebutnya makanan kecil.

⁵² Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm. 102

⁵³ <https://www.kompasiana.com/denimildan/571704fb507a612f05033f3e/industri-rumah-tangga-sebuah-solusi-brilian>, 17 Desember 2019, 11.33 WIB

Yang termasuk camilan antara lain adalah keripik, krakers, biscuit, potato, dan lain-lain.

2. Pengemasan produk

Definisi pengemasan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “cara mengemas yang baik serta prosesnya”. Sementara definisi menurut Amstrong et al. (2014) merupakan “kegiatan merancang dan memproduksi wadah-kemas atau pembungkus untuk suatu produk.”

Kemasan dapat didefinisikan juga sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Kemasan meliputi tiga hal, yaitu merek, kemasan itu sendiri dan label, ada tiga alasan utama untuk melakukan pembungkusan, yaitu:

- a. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemasan melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca.
- b. Kemasan dapat melaksanakan program pemasaran. Melalui kemasan identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya.
- c. Kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha membuat kemasan semenarik mungkin, dengan kemasan yang menarik akan memikat dan

menarik perhatian konsumen.⁵⁴ Kemasan yang dibuat harus memenuhi prinsip-prinsip kemasan sehingga diperoleh kemasan yang aman, nyaman dan komunikatif.⁵⁵

C. JAMINAN PRODUK HALAL

1. Pengertian jaminan produk halal

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.⁵⁶

2. Pengertian sertifikasi halal

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁵⁷ Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.

⁵⁴ Ajie, *Pengembangan Pasar Produk Olahan Kacang Melalui Perbaikan Kemasan*, Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship Vol. 01, No. 01, January, 2016, Hlm. 62

⁵⁵ Maimunah Hindun Pulungan dan Tim, *Tegnologi Pengemas dan Penyimpanan*, (Malang: UB Pers, 2018), Hlm. 1

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Nomor 5

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Nomor 10

- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
 - c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara syariat islam.
 - d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur menurut syariat Islam.
 - e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.⁵⁸
3. Landasan Hukum Sertifikasi Halal

Secara umum, setiap peraturan hukum yang baik pasti memiliki landasan hukum yang kuat, baik berupa landasan hukum material maupun hukum formal. Begitu pula dengan peraturan hukum terkait sertifikasi halal, tentu memiliki landasan hukum. Beberapa ayat al-Qur'an yang melandasi problem halal adalah sebagai berikut:

Dalam QS. an-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَعِبْدُوهٗ⁵⁹

١١٤

⁵⁸ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Perss, 2011), Hlm. 140-141

⁵⁹ Al-Qur'an Surah An-Nahl: 114

*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.*⁶⁰

QS. al-Baqarah ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ⁶¹ ١٧٢

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.*⁶²

Ayat-ayat di atas merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi halal bagi produk-produk (barang dan/atau jasa) yang akan dikeluarkan kepada konsumen. Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT.

Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun regulasi yang terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *AR-RAKHIM Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), Hlm. 280

⁶¹ Al-Qur'an Surah *al-Baqarah*: 172

⁶² Kementerian Agama RI, *AR-RAKHIM Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), Hlm. 26

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Pangan
 - d. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
 - e. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
- Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi/labelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal.⁶³
4. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
 - a. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH).⁶⁴
 5. Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

⁶³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN MALIKI PERSS, 2011), Hlm. 143

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 Nomor 6

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah diatur mengenai pengawasan yang harus dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu pada pasal 49 yang berbunyi:

“BPJPH melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (JPH)⁶⁵”

Pengawasan atas JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH
 - b. Masa berlaku Sertifikat Halal;
 - c. Kehalalan Produk;
 - d. Pencantuman Label Halal;
 - e. Pencantuman keterangan tidak halal;
 - f. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, Penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta Penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - g. Keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
 - h. Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.⁶⁶
6. Proses Produk Halal

Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH, adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, pendistribusian, penjualan dan penyajian Produk.⁶⁷

Dalam proses produk halal, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 49

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 50

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 Nomor 3

lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.⁶⁸ Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
- b. bebas dari najis; dan
- c. bebas dari Bahan tidak halal.⁶⁹

7. Pelaku usaha

a. Pengertian pelaku usaha

Dalam pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷⁰

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Pelaku usaha dalam peranannya sebagai penyedia barang dan/atau jasa memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Undang-

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 21 ayat (1)

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 21 ayat (2)

⁷⁰ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), Hlm. 64

Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur tentang pelaku usaha berhak memperoleh:

- 1) Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- 2) Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- 3) Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.⁷¹

Selain hak, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus di laksanakan, dalam Pasal 24 yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal, wajib:

- 1) Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
- 2) Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- 3) Memiliki Penyelia Halal; dan
- 4) Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Lebih lanjut dalam UUPK menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana berikut:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 23

- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷²

Dalam pasal 25 juga mengatur bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- 1) Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- 2) Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- 3) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- 4) Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.⁷³

⁷² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat (1)

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 25

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGGA TANPA LABEL HALAL

A. Gambaran Umum Kecamatan Ungaran Barat

1. Letak Geografis

Kecamatan Ungaran Barat merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Semarang. Kecamatan Ungaran Barat terletak pada 7,1101°-7,1681° LS dan 110,3604°-110,4125° BT. Secara geografis Kecamatan Ungaran Barat terletak dipaling utara Kecamatan Ungaran Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ungaran Timur dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bergas.⁷⁴

Luas wilayah kecamatan Ungaran Barat adalah seluas 35,96 Km², dengan wilayah paling luas adalah Desa Klisidi dengan luas 7,96 Km², kemudian disusul Desa Lerep dengan luas 6,82 Km². sedangkan desa terkecil adalah Desa Gogik dengan luas 1,49 Km².

Kecamatan Ungaran Barat secara administrative terdiri dari 11 desa yaitu desa Gogik, Langensari, Candirejo, Nyatnyono, Genuk, Ungaran, Bnadarjo, Lerep, Keji, Kalisisdi, dan Branjang. Desa-desa di wilayah Ungaran Baratterbagi atas 58 dusun. RW di Ungaran Barat memiliki

⁷⁴ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang, *Data Strategis Kecamatan* 2019

jumlah 80 , RW terbagi atas beberapa Rukun Tetangga. Jumlah RT secara keseluruhan di wilayah Ungaran Barat adalah 479.

Tabel 3.1 Luas Wilayah
Kecamatan Ungaran Barat

No	Desa	Luas (Km ²)	%
1	Gogik	1,49	4,15
2	Langensari	1,67	4,64
3	Candirejo	2,12	5,90
4	Nyatnyono	4,25	11,82
5	Genuk	1,58	4,39
6	Ungaran	1,66	4,62
7	Bandarjo	2,25	6,26
8	Lerep	6,82	18,97
9	Keji	1,83	5,08
10	Kalisidi	7,96	22,13
11	Branjang	4,33	12,05
Jumlah		35,96	100,00

Sumber: Data Strategis Kecamatan 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

Tabel. 3.2 Wilayah Administrasi
Kecamatan Ungaran Barat

No	Wilayah Administrasi	2016	2017	2018
1	Desa	11	11	11
2	Dusun	58	58	58
3	RW	79	79	80

4	RT	473	473	479
---	----	-----	-----	-----

Sumber: Data Strategis Kecamatan 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

2. Kondisi Demografi

Pada akhir tahun 2018, penduduk Kecamatan Ungaran Barat berjumlah 77.812 orang, dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 38.618 sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 39.194 dengan sex ratio sebesar 99.

Sebaran kelompok umur penduduk sebagian besar terdapat pada usia 40 tahun kebawah dimana proporsi penduduk masih didominasi oleh penduduk perempuan. Penduduk terbanyak terdapat pada Kelurahan Lerep yaitu 11.711 orang, sedangkan populasi penduduk terendah terdapat di Desa Keji sebanyak 2.480 orang.

Secara keseluruhan Kecamatan Ungaran Barat memiliki tingkat kepadatan sebesar 2.164 orang/Km², yang menandakan kependudukan di daerah ini tergolong padat bila dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, karena Ungaran Barat juga sebagai ibu kota Kabupaten Semarang.

Penganut agama islam terbesar yang terdapat di Kecamatan Ungaran Barat terdapat di Desa Lerep yaitu sebesar 10.936 orang, sedangkan jumlah penganut agama islam yang paling sedikit terdapat di Desa Keji sebesar 2.414 orang. Hal berbanding lurus dengan jumlah penduduk dari masing-masing desa. Dimana semakin banyak jumlah penduduk suatu desa maka semakin banyak penganut agama islam di dalamnya. Begitupun sebaliknya

semakin sedikit penduduk suatu desa maka penganut agama islam di dalamnya akan semakin sedikit juga.

Sedangkan penganut agama Kristen mayoritas terdapat di Desa Bandarjo sebanyak 958 orang dan katholik mayoritas terdapat di Desa Ungaran sebanyak 1.149 orang. Penganut agama Kristen dan Katholik umumnya adalah para pendatang yang berasal dari luar wilayah Kecamatan Pringapus dan beradaptasi dari penduduk asli.

Secara umum penduduk di Kecamatan Ungaran Barat berusaha disektor industri dan perdagangan, akan tetapi terdapat sebagian penduduk yang masih berusaha disektor pertanian dan peternakan.

B. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, pembaruan-pembaruan terus dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi setiap warga negaranya. Tak lain mengenai kehalalan suatu produk yang beredar di pasaran maupun di rumahan. Karena tak sedikit bahan-bahan yang seharusnya merupakan bahan yang halal namun dapat menjadi haram untuk dikonsumsi akibat kurang diperhatikannya mekanisme pembuatan dari suatu produk itu sendiri.

Sehingga diterbitkanlah undang-undang yang mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha untuk dapat mencantumkan label halal yang telah ditentukan oleh Negara. Undang-undang tersebut ialah UU No. 33 Tahun 2014

tentang sertifikasi halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini disahkan pada disahkan di Jakarta, pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Republik Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian juga di undangkan pada pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin.⁷⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementrian Agama. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.⁷⁶

Dalam pembentukan lembaga baru, pastilah memiliki apa tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut, tak lain dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang telah resmi menjadi lembaga yang berwenang

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁷⁶ WWW.halal.go.id, diakses pada tanggal 24 Februari 2020

menerbitkan sertifikat halal seperti halnya yang telah penulis sampaikan, BPJPH memiliki visi dan misi sebagaimana berikut:

i. Visi : *Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia*

j. Misi :

- a. Mewujudkan Sistem Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yang Berkualitas
- b. Mewujudkan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif
- c. Mewujudkan Jaringan Kerjasama Kelembagaan dan Standardisasi Jaminan Produk Halal
- d. Mewujudkan Manajemen Organisasi yang Berkualitas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

BPJPH dalam pengaplikasian UU dan telah disahkan sejak tahun 2014 dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih banyak pembenahan-pembenahan dan kekurangan-kekurangan yang mengakibatkan UU tersebut belum direalisasikan. Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan di Kantor Kementrian Agama wilayah Jawa Tengah bahwa sampai ini yang menjadi kekurangan dari BPJPH adalah mengenai tarif layanan sertifikasi halal belum ditetapkan oleh Menteri Keunagan. Sehingga tarif layanan masih menggunakan besarnya tariff yang diberlakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM-MUI. Selain tarif layanan, BPJPH belum memiliki logo sebagai label yang akan di gunakan sebagai identitas bagi pelaku usaha bahwa produknya sudah bersertifikat halal. Logo tersebut untuk saat ini masih

didaftarkan kepada Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mendapatkan hak.⁷⁷

UU No.33 Tahun 2014 tersebut baru bisa di realisasikan pada tanggal 17 Oktober 2019, karena dikhawatirkan akan batal demi hukum sebab sudah hamper lima tahun Undang-undang tersebut belum dilaksanakan. Undang-undang dilaksanakan dengan masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan seperti halnya yang sudah penulis sampaikan.

Sedangkan para pelaku usaha yang masih menggunakan sertikat halal dari MUI diberikan tenggang waktu selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 untuk dapat kembali mendaftarkan produknya melalaui BPJPH.

Pendaftaran yang mulanya dilakukan keseluruhan oleh BPJPH pusat, kini pendaftaran bisa dilakukan di kantor Kementrian Agama Wilayah, karena setiap Kantor Kementrian Agama sudah mendapatka tugas untuk melayani masyarakat dalam hal layanan sertifat halal.

1. Proses/alur penerbitan sertifikat halal

Proses yang ditempuh ketika ingin mendapatkan sertifat halal adalah dengan menyerahkan dokumen oleh pelaku usaha ke Kantor Kementrian Agama terdekat. Yang kemudian jika dokumen pendaftaran sudah lengkap baru kemudian dikirimkan ke LPPOM karena saat ini yang berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah LPPOM saja. Setelah LPPOM selesai memeriksa langsung ke lokasi tempat prosese produk

⁷⁷Drs. H Khotibul Umam, *wawancara sebagai ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal*, (Semarang: 18 Februari 2020)

halal. Setelah itu barulah dokumen-dokumen tersebut di bawa ke komisi fatwa MUI untuk dimintai fatwa dengan sebelumnya LPPOM memberikan pemaparan mengenai bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha terhadap produk yang diajukan. Setelah komisi fatwa MUI mengeluarkan fatwa mengenai halal atau tidak halalnya suatu produk, berkas kemudian di kembalikan lagi ke BPJPH untuk menerbitkan sertifikat.⁷⁸

Berikut merupakan gambar tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan sertifat halal dari BPJPH:



Sumber: WWW.halal.go.id

2. Masa Berlaku Sertifikat Halal

- a. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan BPJPH.
- b. Wajib diperpanjang dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

⁷⁸ Drs. H Khotibul Umam, wawancara sebagai ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal, (Semarang: 18 Februari 2020)

- c. Jika Anda sudah terlanjur mendapat sertifikat halal dari MUI yang akan berakhir tahun 2020, maka sertifikat tersebut tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir. Setelah itu, wajib diperbaharui.

3. Sanksi Bagi yang Melanggar

Ada beberapa sanksi administrasi maupun pidana yang berlaku bagi si pelanggar:

- a. Tidak memisahkan lokasi, tempat dan alat PPH dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan denda administrative
- b. Tidak melakukan kewajiban, seperti sudah dapat sertifikat halal tapi tidak mencantumkan label halal di produk, memperbaharui sertifikat halal yang kedaluwarsa dijerat dengan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan sertifikat halal dicabut
- c. Tidak melakukan resgitrasi sertifikat halal bakal dikenakan sanksi administratif, berupa penarikan barang dari peredaran
- d. Tidak menjaga kehalalan produk yang telah mendapat sertifikat halal, pelaku usaha bisa dipidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar

e. Setiap orang yang terlibat dalam proses JPH dan tidak menjaga kerahasiaan formula yang diserahkan pelaku usaha, dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 2 miliar.⁷⁹

4. Pengawasan BPJPH Terhadap Para Pelaku Usaha Produk Industri Rumah Tangga di Kecamatan Ungaran Barat

Melihat dari apa yang mendasari Undan-undang No. 33 Tahun 2014 ini akan diwajibkan kepada para pelaku usaha baik dalam bidang industri makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya, dan merupakan Undang-undang yang masih dapat disebut baru disahkan pastilah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh BPJPH untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ini.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, BPJPH melakukan sosialisasi melalui berbagai sarana yaitu dari televisi, radio, dan juga melalui dinas-dinas yang lain yang mana dinas tersebut berhubungan dekat dengan para pelaku usaha seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bank Indonesia ketika BI menyelenggarakan festival UKM. Dari dinas-dinas tersebut sosialisasi dilakukan oleh BPJPH guna agar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara dapat berjalan maksimal.

Namun dikarenakan Undan-undang No. 33 Tahun 2014 masih merupakan hal yang baru, dan masih banyak yang belum dapat berjalan

⁷⁹ Drs. H Khotibul Umam, *wawancara sebagai ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal*, (Semarang: 18 Februari 2020)

maksimal, terutama organisasi di Provinsi belum terbentuk dan belum efektif dijalankan. Sehingga secara struktur BPJPH belum terbentuk di daerah, sehingga pengawasan yang efektif dilakukan oleh masyarakat, media, dan dari Kementerian Agama perwilayah itu sendiri.

5. Implementasi Pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 di kalangan pelaku usaha Industri Rumah Tangga di Kecamatan Ungaran Barat

Setelah berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2014 berarti sudah menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pelaku usaha. Mendaftarkan produknya untuk dapat bersertifikat halal dan mendapatkan label halal, yang mana label tersebut akan dicantumkan pada produknya menandakan bahwa produk tersebut aman dan terjamin kehalalannya untuk dikonsumsi. Hal tersebut selain menciptakan rasa aman bagi para konsumen juga dapat menambah nilai jual pada produk tersebut.

Namun, dari beberapa sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPJPH yang mana telah penulis sampaikan sebelumnya, ternyata realisasi dilapangan masih sangat minim mengenai kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar dapat bersertifikat halal. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu pengurus UMKM Makarjati, di Dukuh Karangbolo hanya ada sekitar 17 dari 40 pelaku usaha yang mendaftarkan produknya.⁸⁰

⁸⁰ Alfiah, wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga sekaligus pengurus UMKM Makarjati, (Kecamatan Ungaran Barat: 12 Februari 2020)

Ibu Istirokhah selama menekuni usaha-usaha yang penulis telah sampaikan, produk yang dihasilkan sudah mendapatkan izin usaha, seperti No. P-IRT, namun untuk sertifikasi halal belum didaftarkan sebab menurut beliau label halal dirasa belum begitu penting karena produk yang diproduksi dijamin kehalalannya, sehingga untuk mendaftar sertifikasi halal untuk usahanya belum pernah dilakukan. Pendaftaran yang harus dilakukan menurutnya ibu Istirokhah membutuhkan waktu yang cukup banyak, sedangkan setiap harinya harus melakukan penggorengan untuk usahanya.⁸¹

Ibu Rozak sebagai pelaku usaha, mendapatkan izin usaha adalah suatu keharusan yang harus dilakukan. Dalam hal perizinan, ibu Rozak telah mendaftarkan usahanya, dan telah mendapatkan nomor P-IRT untuk setiap produknya, namun nomor P-IRT yang didapatkan tidak dicantumkan dalam produknya karena ibu Rozak pernah membuat label pada produknya namun label tersebut kemudian di tiru oleh produsen lain, sehingga kemudian ibu Rozak tidak lagi menyantumkan label pada setiap produknya.

Ibu Rozak berkata bahwa mengenai sertifikasi halal beliau sudah mengetahui, dan menyatakan bahwa sudah mendaftarkan produknya, namun sertifikasi halal itu dilakukan sudah beberapa tahun yang lalu, dan sama halnya dengan nomor P-IRT, tidak dicantumkan karena menurut

⁸¹ Istirokhah, *wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga*, (Kecamatan Ungaran Barat: 27 Januari 2020)

beliau produk-produknya dijual di rumah saja, dan membuat dalam jumlah banyak jika ada pesanan, sehingga dirasa terlalu menyusahkan jika harus mencantumkan hal-hal semacam itu, dan beliau beranggapan selagi kita menjunjung nilai kejujuran para konsumen tidak akan pernah merasa kurang puas dengan produknya.⁸²

Ibu Sunarsih selama menekuni usahanya, ia mengatakan bahwa baru mendaftarkan produknya untuk mendapatkan nomor P-IRT belum lama, karena ia tidak begitu mengetahui bagaimana cara yang harus ditempuh untuk mendaftarkan usahanya. Hal tersebut terjadi dikarenakan pula ia beranggapan hal tersebut tidak begitu penting. Begitupun sama halnya dengan pendaftaran sertifikat halal, beliau mengatakan tidak mengetahui peraturan yang mengharuskan untuk mendaftarkan produknya untuk dapat bersertifikat halal.⁸³

Ibu Alfiyah merupakan produsen yang sangat memperhatikan kelengkapan informasi pada produknya, selain memperhatikan mengenai rasa para setiap produknya, kelengkapan informasi merupakan salah satu daya tarik tersendiri terhadap konsumen, karena dengan informasi yang baik pada produk ibu Alfiyah berpendapat akan lebih meninggikan nilai jual karena beberapa konsumen pasti mencari produk yang terbaik.

Informasi yang terdapat label kemasan produk Ibu Alfiyah sudah cukup lengkap, karena sudah mencantumkan tanggal kadaluarsa,

⁸² Rozak, *wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga*, (Kecamatan Ungaran Barat: 12 Februari 2020)

⁸³ Sunarsih, *wawancara sebagai produsen produk industri rumah*, (Kecamatan Ungaran Barat: 12 Februari 2020)

komposisi, Nomor P-IRT, Label halal dan informasi-informasi lainnya yang memang seharusnya dicantumkan. Namun, kaitannya dengan label halal, Ibu Alfiyah mengatakan bahwa label yang saat ini beliau cantumkan dalam produknya, belum diperpanjang, dan labelnya masih berlambangkan MUI, belum di daftarkan kembali dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang sekarang berlaku. karena, beliau mengatakan belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran yang harus dilakukan, Karena belum adanya sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai tatacara pendaftaran sertifikasi halal yang baru.⁸⁴

C. Praktik Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga di Kecamatan Ungaran Barat

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang tak asing lagi didengar, karena jual beli merupakan salah satu kegiatan yang tak pernah lepas dari kegiatan setiap harinya. Begitupun jual beli sudah ada bahkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad Saw. Seiring berkembangnya dari waktu ke waktu jual beli tak lagi begitu sulit dilakukan, karena jual beli bisa dilakukan dengan cara membeli secara langsung maupun kini dapat dilakukan dengan cara online atau lewat sosial media, dengan alat tukar sama yaitu dengan uang. Dan barang yang dijual juga beraneka ragam, dari bahan mentah sampai bahan sampai yang siap saji atau siap langsung dimakan. Baik berupa makanan basah, atau makanan kering yang tahan lama.

⁸⁴ Alfiyah, wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tanggal, (Kecamatan Ungaran Barat: 12 Februari 2020)

Seperti halnya makanan-makanan yang dapat di beli tidak hanya di pasar-pasar atau toko-toko yang tersebar banyak di lingkungan sekitar tempat kita tinggal, namun jual beli juga dapat dilakukan langsung ditempat bahan-bahan siap konsumsi diproduksi. Tak lain halnya di Kecamatan Ungaran Barat yang merupakan salah satu desanya cukup terkenal dengan makanan khasnya yaitu di Dukuh Karangbolo yang terdapat di Desa Lerep yang mana dukuh tersebut terdapat sekumpulan produsen makanan ringan berjeniskan makanan kering berupa tumpi dan makanan-makanan kering lainnya.

Karangbolo merupakan sektor perekonomian dibidang industri rumah tangga yang cukup besar di Kecamatan Ungaran Barat, karena di dukuh ini terdapat kurang lebih 40 produsen yang menekuni usaha jenis makanan ringan ringan atau camilan berjenis keripik, rempeyek, dan jenis-jenis lainnya. Karangbolo merupakan salah satu dukuh di Desa Lerep.

Selain Karangbolo dibeberapa desa lainnya juga terdapat beberapa yang menekuni usaha ini, contohnya Desa Candirejo memiliki industri makanan yaitu keripik talas, kerupuk bakar, keripik gembus, keripik tempe, keripik cabe, dan tahu. Desa Kalisidi, Ungaran, Dan Bandarjo juga terdapat beberapa yang menekuni usaha sejenis. Namun, dari hasil observasi yang penulis lakukan, dari masing-masing desa/kelurahan selain Desa Lerep, jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang produk industri rumah tangga tidaklah signifikan karena hanya beberapa saja yang menekuni usaha tersebut. Dan dari pihak kecamatan maupun kelurahan dari masing-masing desa tidak memiliki data tertulis terkait para pelaku usaha yang menekuni bidang ini.

Beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap para pelaku usaha di Kecamatan Ungaran Barat bahwasannya mereka beranggapan sertifikasi halal belumlah menjadi prioritas dalam menjalankan usaha. Ibu Istirokhah ialah salah satu produsen yang memproduksi beberapa jenis makanan ringan yang berupa keripik tempe, tumpi kacang hijau, dan tumpi rebon, yang mana usaha ini telah ditekuni sejak tahun 2003, produk yang ditekuni oleh ibu Istirokhah di produksi setiap harinya, dan dalam sehari ibu Istirokhah dapat memproduksi kurang lebih 100 bungkus yang kemudian didistribusikan kepada distributor. Ia mengatakan bahwa penjualan yang dilakukan sudah cukup luas, termasuk sampai ke luar kota yaitu Kota Pekalongan, Kebumen, Pati, dan sekitaran Kabupaten Semarang.⁸⁵

Ibu Rozak ialah produsen yang memiliki usaha dari berbagai macam makanan ringan yang telah menekuni usaha ini selama kurang lebih sepuluh tahun, dan usaha ini merupakan mata pencaharian sehari-harinya. Produk yang dihasilkan terdapat beberapa jenis, yaitu tumpi kacang hijau, tumpi rebon, tumpi kacang tanah, keripik tempe, widaran, utuk cacing, dan tai kucing. Dalam satu hari, dapat memproduksi kisaran 40 bungkus perhari. Dalam memproduksi setiap produknya ibu Rozak berprinsip bahwa kualitas adalah yang terpenting, sehingga bahan-bahan yang digunakan menggunakan produk yang berkualitas.⁸⁶

⁸⁵ Istirokhah, *wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga*, (Kecamatan Ungaran Barat : 27 Januari 2020)

⁸⁶ Rozak, *wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga*, (Kecamatan Ungaran Barat: 12 Februari 2020)

Ibu Sunarsih merupakan salah satu pelaku usaha industri rumah tangga yang berada di Dukuh Soka Desa Lerep. Ibu Sunarsih memiliki beberapa produk yang ditekuninya selama kurang lebih 37 tahun, produk-produknya ialah berupa kerupuk barokah, keripik singkong, keripik talas, dan intip goring. Produk-produk tersebut diproduksi 2 hari sekali dengan model rolingan per harinya. Dalam sekali produksi ibu Sunarsih dapat menghasilkan kurang lebih 750 bungkus dengan ukuran bungkusnya plastik $\frac{1}{4}$ kg. Cara mendistribusikannya adalah dengan menitipkan di warung-warung yang cakupannya cukup luas, yaitu sekecamatan Ungaran.⁸⁷

Ibu Alfiyah sebagai produsen di Karangbolo dan juga merupakan pengurus Komunitas yang terdapat di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat, khususnya di Dukuh Karangbolo yang bernama Makar Jati. Ibu Alfiyah menekuni usaha pembuatan berbagai macam jenis rempeyek, yang mana usaha ini sudah ditekuni selama kurang lebih 20 tahun. Produk yang diproduksi oleh Alfiyah diantaranya ada keripik tempe, keripik pare, rempeyek, dan keripik wortel. Namun, Ibu Alfiyah tidak hanya menjual menjual produknya sendiri, beliau menerima produk-produk dari beberapa temannya untuk dipasarkan olehnya, karena usaha yang ditekuni oleh Ibu Alfiyah ini terbilang sudah maju, walaupun cara pendistribusiannya hanya di rumah sendiri, namun Ibu Alfiyah sudah mempunyai langganan tetap yang memesan produknya. Penjualan

⁸⁷Sunarsih, *wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga*, (Kecamatan Ungaran Barat: 12 Februari 2020)

produk dari Ibu Alfiyah sudah cukup luas, yakni sampai Kota Jakarta, Kabupaten Semarang, dan beberapa kota lainnya.⁸⁸

Data yang penulis dapatkan dari 7 konsumen yang penulis teliti, 6 diantaranya memilih membeli produk industri rumah tangga tanpa memperdulikan adanya label halal dan 1 memilih membeli setiap produk yang jelas mengenai informasi yang tercantum pada produk, terutama adanya label halal. Konsumen yang memilih membeli produk tanpa memperdulikan adanya label halal menganggap bahwa selama mengkonsumsi makanan tersebut tidak terjadi apa-apa berarti aman, dan beranggapan makanan berjenis ini sudah pasti kehalalannya, sehingga mereka tidak khawatir untuk mengkonsumsinya. Berikut merupakan beberapa konsumen yang telah penulis teliti.

Ibu Apriyani, warga Desa Lerep sebagai konsumen produk kemasan dari produk industri rumah tangga. Adapun produk yang biasa dibelinya berupa keripik usus, kerupuk, dan jenis-jenis produk makanan kering lainnya. Ia berkata bahwa iya membeli makanan tersebut sebagai camilan di rumah, dan sebagai suguhan ketika ada tamu yang berkunjung, dan sebagai pelengkap ketika makan. Ia berkata bahwa stiap kali membeli produk semacam ini, dia tidak pernah memperhatikan secara detil mengenai kelengkapan informasi pada produk tersebut, yang paling diperhatikan adalah mengenai tanggal kadaluarsa.⁸⁹

⁸⁸ Alfiyah, *wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga*, (Kecamatan Ungaran Barat: 12 Februari 2020)

⁸⁹ Apriyani, *wawancara sebagai konsumen*, (Karangbalo: 22 Januari 2020)

Ibu Ayu Karlina, selaku pembeli makanan-makanan ringan mengatakan bahwa ketika ia hendak membeli suatu produk kemasan selalu memperhatikan informasi produk, terutama harus ada label halal dari MUI, jika produk yang dibelinya merupakan produk rumahan atau produk industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label halal, yang pertama dilihat adalah harus adanya nomor P-IRT, jika tidak ada nomor P-IRT juga maka ibu Ayu lebih memilih tidak jadi membeli produk tersebut. Dia mengatakan bahkan hal-hal kecil seperti membeli permen seharga Rp. 500,- dia sangat memperhatikan mengenai label halal dari MUI. Hal ini dilakukan karena Ibu Ayu sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh keluarganya. Karena Ibu Ayu pernah mengalami gangguan kesehatan karena mengonsumsi telur asin yang tidak terdapat informasi apapun dari jenis makanan ini.⁹⁰

Bapak Hariadi salah satu konsumen mengatakan bahwa setiap hari selalu ada makanan ringan yang tersedia dirumahnya. Ketika membeli setiap produk khususnya makanan kemasan bapak Hariadi mengatakan tidak pernah memperhatikan informasi apa saja yang terdapat pada kemasan produk. Yang paling diperhatikan adalah mengenai rasa dari makanan tersebut. Jika dirasa enak maka beliau akan membelinya, terkhusus lagi jika membeli produk industri rumah tangga, bapak Hadi sudah meyakini bahwa makanan jenis ini sudah dijamin halal.⁹¹

⁹⁰ Ayu Karlina, *wawancara sebagai konsumen*, (Lerep: 9 Februari 2020)

⁹¹ Hariadi, *wawancara sebagai konsumen*, (Lerep: 9 Februari 2020)

Ibu Ninis Lestari seorang konsumen dan biasa membeli makanan ringan sebagai camilan di rumah, juga sebagai teman makan. Dia mengatakan ketika di rumah tidak ada stok camilan, maka seperti ada yang kurang. Karena camilan merupakan teman yang baik saat sedang bersantai dengan keluarga, dan walau hanya sebagai teman menonton televisi. Ibu Ninis mengatakan ketika membeli suatu produk, terutama produk industri rumah tangga terkadang memperhatikan informasi produk, namun yang lebih menjadi perhatian ialah mengenai tanggal kadaluarsa, karena tanggal kadaluarsa adalah salah satu informasi penting mengenai masih layak atau tidaknya produk tersebut dikonsumsi. Mengenai informasi kehalalan produk, ibu Ninis berkata mengetahui adanya peraturan tersebut, namun dalam pengaplikasiannya tetap kurang diperhatikan ketika membeli suatu produk.⁹²

⁹² Ninis Lestari, *Wawancara sebagai konsumen* (Lerep: 9 Februari 2020)

BAB IV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PENGAWASANNYA PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN UNGARAN BARAT

A. Analisis Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat

Manusia merupakan penduduk bumi yang tak akan pernah lepas dari kebutuhan-kebutuhan yang dapat menyokong keberlangsungan hidupnya, dan juga kita sebagai manusia merupakan makhluk di bumi yang paling sempurna dibandingkan makhluk bumi lainnya. Sebagai makhluk hidup, pastilah membutuhkan makanan sebagai kebutuhan primer untuk memenuhi asupan yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebab kebutuhan tersebutlah manusia selalu mengkonsumsi makanan setiap harinya.

Berdasarkan kebutuhan dalam setiap harinya, kini makanan yang dibutuhkan tak lagi hanya yang mengandung karbohidrat saja sebagai pemenuhan kebutuhan tubuh. Dan semakin berkembangnya zaman, makanan-makanan yang kita butuhkan kini dapat kita dapatkan dengan sangat mudahnya tanpa harus bersusah payah membuat sendiri, karena semakin banyaknya pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pangan.

Banyaknya pelaku usaha khususnya dalam bidang pangan selain mempermudah para konsumen untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, juga sebagai salah satu sarana sebagai pengurangan tingkat pengangguran di Negara

kita saat ini. Sehingga kini semakin banyaknya para pelaku usaha, maka semakin banyak inovasi-inovasi yang dilakukan agar produk-produknya lebih menarik dan banyak digemari oleh konsumen. Sehingga variasi yang dilakukanpun bermacam-macam, ada yang membuat makanan cepat saji, restoran, dan makanan-makanan kecil sebagai camilan.

Camilan atau makanan ringan selain banyak digemari sebagai teman berbincang santai, juga dapat disandingkan untuk teman makan, sehingga tak jarang banyak konsumen yang membutuhkan makanan ringan ini untuk selalu tersedia di rumah mereka. Banyaknya peminat dari jenis makanan ini, sehingga tak sedikit para pelaku usaha menekuni usaha ini, dan juga mengembangkan ide-ide barunya agar camilan yang diproduksi tidak monoton dan dapat lebih berani bersaing dengan produsen-produsen lainnya.

Tak lain halnya di Kecamatan Ungaran Barat yang tak hanya terkenal dengan pariwisatanya yang cukup banyak, ternyata juga memiliki sektor perekonomian dalam hal pangan. Salah satu yang cukup besar dan cukup terkenal adalah makanan ringannya yaitu jenis tumpi di Dukuh Karangbolo yang mana sudah penulis sampaikan pada bab sebelumnya. Tak hanya satu atau dua orang saja yang menekuni makanan jenis ini, terdapat kurang lebih 40 pelaku usaha yang menekuni jenis makanan ini dan semua jenisnya hampir sama. Namun walaupun produknya mayoritas sama, para pelaku usaha memiliki ciri khasnya masing-masing dalam hal pendistribusian produknya, terutama hal rasa. Dukuh ini cukup terkenal karena rasa dari produk-produk yang dihasilkan memiliki cita rasa yang enak.

Berhubungan semakin banyaknya produk-produk yang beredar di Indonesia baik produk-produk dalam Negeri seperti halnya makanan ringan yang penulis sebutkan di atas, maupun produk-produk luar Negeri yang kini sudah banyak beredar luas di pasaran. Oleh sebab hal itu, tak jarang terdapat produk yang beredar namun tidak baik untuk dikonsumsi karena ada beberapa yang mengandung bahan yang tidak halal. Sehingga keamanan-keamanan bagi konsumen harus semakin ditingkatkan karena mayoritas penduduk Negara ini merupakan muslim.

Pembenahan-pembenahan mengenai peraturan terhadap produk yang beredar kini telah diatur oleh undang-undang yang mengharuskan adanya sertifikat halal bagi para pelaku usaha. Adapun produk yang dimaksud adalah produk kemasan. Yang dimaksud produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai,⁹³ digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. bila sudah memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, kehalalan bahan baku dan cara pembuatan, ketiga jenis produk itu wajib mengajukan sertifikasi halal.

Makanan ringan yang diproduksi oleh para pelaku usaha khususnya di Kecamatan Ungaran Barat saat ini hanya beberapa saja yang sudah mencantumkan label halal, namun label tersebut masih menggunakan label yang lama yaitu dari MUI. Para produsen masih beranggapan bahwa

⁹³Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Halal, Pasal 1, poin a

mendaftarkan sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada produknya

Istirokhah:

“Saya mengetahui adanya keharusan untuk mendaftarkan label halal pada setiap produk yang di produksi, namun untuk mendafkan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan saya setiap harinya harus melakukan penggorengan produk saya, sehingga saya rasa hal tersebut membuang-buang waktu, lagipula produk saya sudah dijamin halal”⁹⁴

Sedangkan pelaku usaha yang telah bersertifikat halal namun belum memperpanjang sertikat halalnya karena belum adanya sosialisasi mengenai pembaharuan terhadap sertikat halal, namun yang menjadi masalah di sini adalah sertifikat yang saat ini masih digunakan sudah habis masa aktifnya dengan jangka waktu yang cukup lama dari masa aktif sertifikat yang digunakan.

“Menurut saya kelengkapan informasi pada produk itu sangat penting, karena dapat menambah nilai jual dan dapat memastikan bahwa produk yang saya jual tertip administrasi, tapi label yang saya gunakan ini belum saya perpanjang, terakhir masa aktifnya itu di tahun 2019, mau daftarin yang baru belum tau bagaimana, dan apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar karena belum ada sosialisasi juga dari dinas-dinas terkait”⁹⁵

Berkaitan dengan yang telah disampaikan oleh para pelaku usaha mengenai sertifikasi halal ini, yang dikhawatirkan adalah kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha untuk mengikuti dan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, padahal adanya peraturan ini tidak hanya untuk meningkatkan nilai jual para produsen, akan tetapi juga demi melindungi hak-

⁹⁴ Istirokhah, wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga, (Kecamatan Ungaran Barat: 27 Januari 2020)

⁹⁵ Alfiah, wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga, (Kecamatan Ungaran Barat: 12 Februari 2020)

hak konsumen untuk dapat memproduksi makanan yang terjamin kehalalannya.

Jika para pelaku usaha beranggapan bahwa produk yang dijualnya hanyalah sebatas makanan tradisional yang sudah dijamin kehalalannya sehingga dirasa hal tersebut belum perlu dilakukan.

“kalau sertifikasi halal belum mbak, lagian produk saya semuanya dari bahan-bahan alami, yaitu singkong, talas, dan kerupuk, menurut saya itu sudah jelas kehalalannya.”⁹⁶

Hal tersebut akan berakibat ketetapan peraturan yang telah diberlakukan tidak akan berjalan maksimal karena dari pihak pelaku usaha belum mau menjalankan peraturan yang ada, sedangkan peraturan tersebut ditujukan langsung kepada para pelaku usaha. Walaupun hanya memproduksi makanan ringan namun hal tersebut sudah menjadi kewajiban untuk didaftarkan sertifikat halal sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI Nomor : SK 11/Dir/LPPOM MUI/II/14-revl yang menyebutkan Kelompok dan Jenis Produk Bersertifikat Halal MUI.

Kelompok Makanan Ringan (Snack) Jenis produk (Type of product):

1. Ekstrudat (Extrudate)
2. Biskuit (termasuk cookies/crackers/wafer) I Biscuit (including cookies/crackers/wafer)

⁹⁶ Sunarsih, *wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga*, (Kecamatan Ungaran Barat:12 Februari 2020)

3. Snack Kacang (Nuts Snack)
4. Kerupuk (Crackers)
5. Keripik (Chips)
6. Gula kapas/Arumanis
7. Snack Sereal (Cereal Snack)
8. Snack tradisional (Traditional Snack)⁹⁷

Dari hasil keputusan tersebut dapat dilihat bahwa walaupun hanya berupa *snack* tetaplah wajib untuk mendaftarkan produknya agar dapat bersertifikat halal. Jika dulu pendaftaran sertifikasi halal yang masih didaftarkan oleh MUI masih bersifat suka rela, dengan adanya undang-undang No. 33 Tahun 2014 berlaku, maka pendaftaran sertifikasi halal bersifat wajib. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH. Kewajiban setiap produk yang beredar wajib bersertifikat halal seperti halnya yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yang berbunyi:

*“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”*⁹⁸

Dari penjelasan pasal tersebut dan juga telah dikuatkan oleh SK LPPOM MUI yang telah penulis sampaikan sebelumnya sangatlah jelas mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap produsen untuk

⁹⁷ SK 11/Dir/LPPOM MUI/II/14-rev1, bagian lampiran, Hlm. 8

⁹⁸ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Pasal 4, Hlm. 3

melakukan sertifikasi pada produk olahannya. Sedangkan, produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat seperti diketahui masih terdapat produsen yang belum mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk industrinya. Mencantumkan label halal juga merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh produsen karena label tersebut sebagai bukti bahwa produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh konsumen.

Sertifikasi yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para produsen guna melindungi hak-hak konsumen, informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting karena menjadi gambaran mengenai produk tersebut. Sebagaimana yang juga telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 7 sebagaimana berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha,
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁹⁹

Undang-undang tersebut pada intinya pasal ini menjelaskan bahwa para pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang ditawarkannya serta memberikan pelayanan dan ganti rugi apabila barang yang ditawarkannya tidak sesuai dengan standar mutu yang ditawarkan. Sedangkan, produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat masih banyak yang tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen karena tidak mencantumkan label halal yang merupakan salah satu kewajiban para produsen guna memenuhi hak-hak para konsumen, dan merupakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Negara.

Beberapa Pasal di dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) juga telah menjelaskan bahwa makanan yang diperjualbelikan dalam bentuk kemasan haruslah mencantumkan beberapa ketentuan yang memuat informasi untuk para konsumen. Diantaranya terdapat pada pasal berikut¹⁰⁰:

- 3) Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi

⁹⁹ Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.

- 4) Pada Pasal 97 ayat (3) pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- j) Nama barang;
- k) Daftar bahan yang digunakan;
- l) Berar bersih atau isi bersih;
- m) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- n) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- o) Tanggal dan kode produksi;
- p) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- q) Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
- r) Asal usul bahan pangan tertentu.

Beberapa peraturan tersebut semakin menguatkan betapa pentingnya mencantumkan informasi pada produk. Tak lain halnya mengenai label halal. Karena pencantuman label halal pada kemasan produk akan membuat konsumen merasa benar-benar aman ketika mengonsumsi produk tersebut. Selain karena setiap individu dapat disebut sebagai konsumen, karena setiap orang pastilah membutuhkan makanan, oleh karena itu perlindungan-perlindungan terhadap penjaminan mutu dan keamanan suatu pangan selalu diperhatikan dan sangat ditekankan, dengan tujuan akan mendapatkan kenyamanan dan perlindungan.

B. Analisis Pengawasan Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 masih bersifat sangat baru, karena mulai berlaku terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019, sehingga dalam pengaplikasiannya pastilah masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan.¹⁰¹

Bidang Urusan Agama Islam (Urais) dan Pembinaan Syariah'ah (Binsyar) Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah merupakan bidang yang saat ini mengemban tugas sebagai badan yang saat ini memiliki fungsi sebagai BPJPH di wilayah Jawa Tengah. Adapun tugas dan Fungsi tugas Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah diantaranya ialah melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.



Sumber: <https://jateng.kemenag.go.id/unitkerja/urusan>

¹⁰¹ Drs. H Khotibul Umam, wawancara sebagai ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal, (Semarang: 18 Februari 2020)

Fungsi Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rukyat dan pembinaan syariah serta sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah, dan
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.¹⁰²

Susunan Organisasi Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

- a. Seksi Kepenghuluan

Seksi Kepenghuluan melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kepenghuluan.

- b. Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama

Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan kantor urusan agama.

- c. Seksi Kemasjidan

Seksi Kemasjidan melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kemasjidan.

¹⁰² <https://jateng.kemenag.go.id/>, diakses pada 3 Maret 2020

- d. Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam

dan Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang produk halal, pembinaan syariah dan sistem informasi urusan agama Islam.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional

(Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2012)

Pada poin di atas, yaitu Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam merupakan seksi yang menanggungjawab salah satunya terkait tentang produk halal sebagaimana yang telah tercantumkan di atas.

Walaupun tugas yang diberikan masihlah bersifat tugas tambahan, namun untuk saat ini dan seterusnya alur pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat halal sudah tidak melalui BPJPH pusat lagi. Masa transisi inilah yang membuat pengaplikasian dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 masih belum berjalan bagaimana seharusnya. Karena masih banyak lagi hal-hal yang harus dilakukan dan diperhatikan. Diantaranya

Adapun proses alur pendaftaran sampai dengan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal adalah yang pertama pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag di setiap Kabupaten/Kota. Permohonan sertifikat halal harus

dilengkapi dengan dokumen seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan tersebut akan dilakukan oleh BPJPH. Memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini ada LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi. Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal. Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal

Dalam pelaksanaannya saat ini mengenai alur pendaftaran yang baru, pelaku usaha produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat khususnya masih belum ada yang tercatat telah mendaftarkan sertifikasi halal di Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah. Karena sosialisasi yang dilakukan belum sampai kepada para pelaku usaha ditingkat kabupaten.

“saya itu mau mendaftarkan usaha saya, tapi saya tidak tau bagaimana alur pendaftarannya mbak, karena belum ada sosialisasi dari pihak terkait.”

Fungsi Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dalam hal kehalalanan produk yang telah tercantum di atas untuk saat ini sudah mulai berjalan. Kaitannya dengan produk halal yang saat ini sudah harus berpedoman pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Halal selain menerima pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal, juga harus melakukan

pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal. Yang dimaksud Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.¹⁰³

Salah satu tugas dari BPJPH adalah melakukan pengawasan terhadap JPH, yang mana pengawasan tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa suatu produk yang telah bersertifikat halal tetap terjamin kehalalannya. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah pasal 75 tentang pengawasan yang berbunyi:

Pasal 75

(1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

(2) Pengawasan terhadap JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPJPH secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁰⁴

“sampai saat ini Kementrian Agama (Kemenag) Wilayah Jawa Tengah belum pernah menerbitkan sertifikat halal, karena yang mendaftarkan baru sampai tahap memverifikasi data dari para produsen yang telah mendaftarkan produknya, namun untuk kedepannya apabila peraturan ini sudah berjalan dengan baik, pengawasan yang dilakukan akan lebih diperketat dari berbagai pihak, dan apabila terdapat pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya, padahal dia sudah memiliki sertifikat halal akan diberikan sanksi”¹⁰⁵

¹⁰³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal, pasal 75

¹⁰⁵ Drs. H Khotibul Umam, wawancara sebagai ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal, (Semarang: 18 Februari 2020)

Untuk saat ini pengawasan masih belum maksimal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, karena sampai ini di wilayah Jawa Tengah belum pernah menerbitkan sertifikat halal. Sehingga untuk pengawasan yang dilakukan belum sampai turun langsung, dan pengawasan yang efektif saat ini masih mengandalkan dari pengawasan dari pihak masyarakat.

Alangkah lebih baiknya jika pengawasan yang dilakukan melingkupi dari jajaran tingkat terkecil seperti dari kantor kecamatan setempat memiliki satuan tugas yang bertanggungjawab dalam pengawasan pada setiap kelurahan, hal ini selain akan mempermudah pada pelaku usaha juga dapat mempermudah Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jateng dalam pengawasannya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal Di Kecamatan Ungaran Barat

Makanan dan minuman yang kita makan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Hanya dengan makanan dan minuman sel-sel dalam tubuh kita akan terbentuk sehingga jasmani kita dapat tumbuh dengan normal. Apabila seseorang kekurangan makanan atau minuman maka badan akan terasa lemah dan bisa mengakibatkan jatuh sakit. Hal inilah yang membuat makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang penting sebagai pemenuhan kebutuhan tubuh kita.

Kita umat muslim dalam pemenuhan kebutuhan untuk tubuh pastilah sudah menjadi keharusan memperhatikan setiap apa yang akan masuk dalam tubuh kita. Terutama berkaitan dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari, kita harus memperhatikan makanan tersebut merupakan

makanan yang baik untuk kita konsumsi atau merupakan makanan yang seharusnya tidak boleh masuk dalam tubuh kita.

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Banyak makanan yang diperbolehkan untuk kita makan diantaranya berupa tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang pada dasarnya halal untuk dimakan, kecuali apabila terdapat petunjuk (dalil) dari Al-Quran dalam hadits yang mengharamkannya. Oleh karena itu, Islam menyatakan kepada umat manusia, dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ¹⁰⁶

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.*¹⁰⁷

Pada ayat di atas, Islam menganjurkan agar manusia memakan makanan yang halal dan baik yang telah Allah sediakan di bumi lengkap dengan isinya. Seperti halnya firman Allah yang menegaskan tentang keharusan memakan makanan yang halal bagi setiap umat muslim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٨٧ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ¹⁰⁸

٨٨

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang

¹⁰⁶ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 172

¹⁰⁷ Kementrian Agama RI, *Ar-Rakhim Alqur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), Hlm.

¹⁰⁸ Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 87-88

Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”¹⁰⁹

Dari firman Allah tersebut ditujukan kepada setiap orang Islam diperintahkan makan makanan yang baik-baik dan bersyukur kepada Allah SWT atas rizki yang diberikan-Nya. Makanan yang kita butuhkan tidak semuanya dapat kita produksi sendiri di rumah, terkadang kita membutuhkan makanan yang dihasilkan oleh orang lain.

Jual-beli merupakan satu kegiatan yang tak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Karena jual-beli sudah menjadi suatu kebutuhan sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan. Oleh sebab itu Allah sudah mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan jual-beli, dan mengatur bagaimana makanan yang baik untuk dikonsumsi dan yang tidak baik untuk dikonsumsi, serta diatur bagaimana cara mendapatkannya. Jual beli haruslah memperhatikan nilai-nilai keadilan serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain karena pada jual beli yang terdapat cacat bisa menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Dalam pengaplikasian jual beli yang terjadi di Kecamatan Ungaran Barat ini, yang menjadi penjual di sini adalah para produsen produk industri rumah tangga, sedangkan yang menjadi pembeli adalah masyarakat

¹⁰⁹ Kementrian Agama RI, *Ar-Rakhim Alqur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), Hlm. 122

Kecamatan Ungaran Ungaran Barat khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

2. Sighat (lafal ijab dan qabul)

Ijab dan qabul dilakukan dengan cara lisan yaitu para distributor memesan langsung kepada para produsen, atau pemesanan melalui online.

3. Ada barang yang dibeli

Barang yang diperjual belikan ialah produk-produk yang diproduksi oleh para produsen seperti keripik-keripik, tumpi, dan produk lainnya.

4. Ada nilai tukar pengganti barang¹¹⁰

Dalam hal ini nilai tukar pengganti barangnya berupa uang.

Dari masing-masing rukun dalam jual beli terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi dari masing-masing rukun. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

2. syarat-syarat orang yang berakad ialah Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:
 - a. Berakal. Oleh sebab itu jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jual beli yang dilakukan ditandai dengan sudah cukup umur atau baligh.
 - b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.¹¹¹
3. syarat ijab qabul itu sebagai berikut:
 - a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

¹¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 118

¹¹¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Hlm. 72-73

- b. Kabul sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan qabul itu harus dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual-beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
4. Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (*ma' uqud 'alaih*)
- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang, tidak boleh diperjual-belikan.
 - d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung , atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
 - e. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.¹¹²
5. Syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama fiqh mengemukakan yang menjadi syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannyapun harus jelas.
- c. Apabila jual-beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharmkan syara' seperti babi

¹¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH,2014), Hlm. 57

dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.¹¹³

Dari syarat-syarat di atas, berdasarkan Praktik jual beli yang dilakukan di Kecamatan Ungaran Barat mayoritas dilakukan di rumah para produsen langsung. Sehingga syarat-syarat yang telah penulis sebutkan beberapa diantaranya telah terpenuhi. Akan tetapi masih terdapat syarat yang belum terpenuhi yaitu yang berkaitan dengan barang yang diperjual-belikan (*ma'uqud 'alaih*). Dalam hal ini di Kecamatan Ungaran Barat masih banyak yang belum menerapkan syarat-syarat dari barang yang diperjual-belikan (*ma'uqud 'alaih*) yaitu yang berkenaan dengan barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat. Dalam hal ini yang terjadi di Kecamatan Ungaran Barat adalah masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal, bahkan tidak adanya label sebagai informasi terkait produk yang dijual.

Prinsip hukum muamalat, Islam telah menjelaskan bahwa segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali hal-hal yang telah ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Muamalat sejatinya dilakukan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat, menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, kejujuran, serta menepati amanat. Produk industri rumah tangga di Kecamatan ungaran Barat banyak yang belum mencantumkan label halal pada kemasan produknya, bahkan banyak yang tidak mencantumkan label pada produknya,

¹¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 124

sehingga informasi yang seharusnya menjadi hak para konsumen tidak bisa didapatkan sebab kurangnya perhatian mengenai pentingnya pencantuman label pada produk. Hal tersebut merupakan suatu yang mengandung madharat bagi konsumen, dikarenakan ketidakjelasan baik bahan yang digunakan apakah seluruhnya menggunakan bahan yang halal dalam pembuatan makanan tersebut, sehingga dikhawatirkan menimbulkan efek negatif atau kerugian bagi konsumen ketika mengkonsumsi makanan tersebut.

“saya pernah mengalami keracunan setelah memakan telur asin. Setelah makan telur asin itu, saya mengalami muntah-muntah. di telur asin tersebut kan tidak ada komposisi, tanggal kadaluarsa, dan label halalnya. Jadi, saya gak tau apakah sebenarnya telur asin tersebut masih layak konsumsi atau tidak sebenarnya”¹¹⁴

Dari pengalaman salah satu konsumen tersebut dapat dikaji betapa informasi pada produk merupakan hal yang penting untuk dicantumkan pada produk, karena dari informasi tersebut para konsumen dapat memprediksi apakah makanan ini masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Apakah produk yang akan dibelinya merupakan produk yang baik untuk dikonsumsi atau tidak. Karena dalam fiqih bermuamalah sudah menjelaskan tentang rukun dan syarat sah jual beli, diantara sudah menjelaskan mengenai syarat apa saja yang harus terpenuhi dalam barang yang diperjual-belikan.

Syarat-syarat umum dalam jual-beli adalah syarat-syarat yang harus ada disetiap jenis jual-beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar’i, dimaksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi yang harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko

¹¹⁴ Ayu Karlina, *wawancara sebagai konsumen*, (Lerep: 9 Februari 2020)

atau spekulasi, keugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.¹¹⁵

Apabila dikaji menurut pandangan Islam, pencantumkan label halal pada produk industri rumah tangga merupakan salah satu hal yang harus dilakukan demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Karena dalam syarat sah jual beli sudah dijelaskan bahwa adanya keharusan salah satunya yaitu terhindar dari cacat, yaitu ketidakjelasan. Kaitannya dengan sertifikasi halal suatu produk adalah apabila para pelaku usaha menjalankan kewajibannya mengenai keharusan dalam melakukan sertifikasi halal, yang mana setelah mendaftarkan secara otomatis akan mendapatkan label halal yang akan dicantumkan pada label produknya. Hal tersebut akan memberikan kejelasan pada produknya bahwa produk yang diproduksinya merupakan halal dan aman untuk dikonsumsi.

Pemerintah menerapkan peraturan terkait serifikasi halal juga bertujuan untuk melindungi konsumen agar lebih merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi maupun menggunakan suatu produk/jasa. Dalam hal jual beli pada dasarnya sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli, namun beberapa hal juga harus diperhatikan oleh para produsen dan konsumen terkait peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mencapai kemaslahatan hidup bernegara. Allah juga telah berfirman dalam al-Qur'an

¹¹⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2007), Hlm. 55

untuk mentaati peraturan dari pemimpin negara selagi peraturan tersebut tidak menyalahi ketetapan Allah Swt. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa : 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹¹⁶

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹¹⁷

Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai wajibnya produk bersertifikat halal yang telah termuat padal pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha.

¹¹⁶. Al-Qur'an Surat An-Nisaa: 56

¹¹⁷. Kementrian Agama RI, *Ar-Rakhim Alqur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), Hlm.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat belum berjalan dalam pengaplikasiannya di kalangan para produsen. Karena beberapa produsen masih beranggapan bahwa bersertifikat halal belum menjadi kebutuhan mendesak terhadap produknya. Sedangkan produsen yang sudah memiliki sertifikat halal masih menggunakan sertifikat yang lama yaitu dari MUI, belum menggunakan sertifikat dari BPJPH. Hal tersebut dikarenakan kurang mengetahuinya dari produsen tersebut mengenai tatacara yang harus dilakukan jika ingin mendaftarkan sertifikat yang baru dari BPJPH.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH pada produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat dapat dikatakan belum berjalan. Karena, saat ini Kementrian Agama Provinsi Jawa tengah yang mengemban tugas sebagai BPJPH di wilayah Jawa Tengah belum pernah mengeluarkan sertifikat halal untuk suatu produk, dikarenakan saat ini bagi para produsen-produsen yang telah mendaftarkan sertifikat halal baru samapai tahapan pengecekan oleh LPH atas kebenaran dokumen yang diajukan oleh produsen. Sedangkan pengawasan dilakukan untuk

penjagaan terhadap jaminan produk halal terhadap produk yang telah bersertifikat halal. Sedangkan pengawasan yang dilakukan terhadap produsen yang belum mendaftarkan sertifikat halal, saat ini masih hanya mengandalkan peran aktif dari masyarakat.

3. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat sudah terpenuhi rukun-rukunnya yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Namun ada syarat yang belum terpenuhi, yaitu syarat dari barang yang diperjual-belikan (*ma'qud alaihi*)nya yaitu belum jelasnya zat, jumlah, dan sifat dari barang yang diperjual-belikan. Akan tetapi jual beli ini dilakukan atas dasar saling percaya yaitu pembeli mempercayakan sepenuhnya kepada produsen tentang produk yang diperjual-belikan. Sehingga jual beli ini termasuk jual beli yang diperbolehkan, namun tidak dianjurkan karena melanggar ketentuan Undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu sekiranya disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para produsen sebaiknya lebih memperhatikan kelengkapan informasi para produk yang dijual. Dan segera mendaftarkan sertifikat halal kepada lembaga terkait guna mentaati peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Mencantumkan label halal selain menjadi suatu kewajiban juga sangat berguna untuk menaikkan nilai jual produk tersebut, karena

label halal merupakan suatu lambing yang mencerminkan bahwa produk yang dijual merupakan produk yang sudah teruji kehalalannya.

2. Kepada BPJPH atau lembaga terkait untuk dapat mensosialisasikan lebih intens lagi mengenai pentingnya mendaftarkan sertifikat halal kepada para produsen, dan lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi jika terdapat penyalahan terhadap produsen-produsen yang masuk dalam golongan wajib bersertifikat halal terhadap produk-pruduknya.
3. Kepada konsumen dan segenap masyarakat, untuk saling mengingatkan mengenai kewajiban dalam menekuni suatu peraturan yang telah dibuat. Karena selalu adanya pembaruan atau peraturan-peraturan baru yang dibuat terkhusus mengenai makanan tak lain adalah untuk melindungi kebaikan kita sebagai konsumen. Bahkan produsen suatu produk juga pastinya akan mengkonsumsi produk lain, jadi sudah selayaknya untuk saling menjaga dan memperhatikan apa yang kita konsumsi.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terkhusus bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Muhammad, Abdul Basith as-Sayyid. *Pola Makan Rasulullah*. Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya, 2009.

Alma Buchori. *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1994.

Ghazali, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* jilid V. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jdmoleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.

Asikin, Zainal Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Kunto, Suharsini ari. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016.

Hasan, M. Ali. *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Gravoindo Persada, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulugh Al Marom Min Adillaat Al-Ahkam*. Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2014.

Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5. Depok: Gema Insani, 2007.

as-Sa'di, Syeh Abdurrahman dkk. *Fiqh Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008.

Mubarok, Jaih dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.

Hidayat, Endang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
Pulungan, Maimunah Hindun dkk. *Teknologi Pengemas dan Penyimpanan*. Malang: UB Pers, 2018.

Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Grup, 2018.

al Mishri, Ibn Nurjaim dan al-asybah wa an-Nazha'ir. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

SK 11/Dir/LPPOM MUI/II/14-revl, bagian lampiran,

SKRIPSI

Agustina Eka Fasya. 2018. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)"* Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo

- Kholiq Muhammad. 2010. *Studi Analisis Terhadap Prduk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang
- Prabowo Ricky. 2018 *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung”* Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
- Nikmah Faridatun. 2015. *“Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan (Studi Di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama’ Indonesia Jawa Tengah)”* Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang

JURNAL

- Hidayat, Asep Syarifuddin dan Siradj Mustolih. *“Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri. penelitian Ahkam”*: Juli Vol. XV, No. 2, 2015.
- Kurniawan. *“Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”*, Jurnal Penelitian UNRAM, Februari. ISSN 0854-0098 Vol. 18 No.1, 2014.
- Ajie. *“Pengembangan Pasar Produk Olahan Kacang Melalui Perbaikan Kemasan”*, Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship Vol. 01, No. 01, 2016.

WAWANCARA

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang, Data Strategis Kecamatan 2019
- Istirokhah. *wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga. Kecamatan Ungaran Barat, 27 Januari 2020.*

Rozak. *wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga*. Kecamatan Ungaran Barat, 12 Februari 2020.

Sunarsih. *wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga*. (Kecamatan Ungaran Barat: 12 Februari 2020.

Alfiyah. *wawancara sebagai produsen produk industri rumah Tangga*. Kecamatan Ungaran Barat, 12 Februari 2020.

Umam, H Khotibul, Drs.,. *wawancara sebagai ketua Satgas Layanan Sertifikasi Halal*. Semarang, 18 Februari 2020.

Apriyani. *wawancara sebagai konsumen*. Karangbolo, 22 Januari 2020.

Ayu Karlina. *wawancara sebagai konsumen*. Lerep, 9 Februari 2020.

Hariadi. *wawancara sebagai konsumen*. Lerep, 9 Februari 2020.

Lestari, Ninis. *Wawancara sebagai konsumen*. Lerep, 9 Februari 2020.

LAIN-LAIN

Kementrian Agama RI. *AR-RAKHIM Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

<https://www.kompasiana.com/denimildan/571704fb507a612f05033f3e/industri-rumah-tangga-sebuah-solusi-brilian>. 2019.

WWW.halal.go.id. 2020.

<https://jateng.kemenag.go.id/>. 2020.

LAMPIRAN I:

DOKUMENTASI

Produsen dan Produk Industri Rumah Tangga yang diproduksi, Konsumen serta Kepala Bagian Jaminan Produk Halal Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah



Wawancara dengan Ibu Alfiyah



Produk ibu Alfiyah



Wawancara dengan Ibu Rozak



Produk yang diproduksi Ibu Rozak



Wawancara dengan Ibu Sunarsih



Produk olahan Ibu Istirokhah



Wawancara dengan Bapak Khotibul Umam



Wawancara dengan Ibu Ninis



Wawancara dengan Bapak Hariadi



Wawancara dengan Ibu Ayu Karlina

LAMPIRAN II:

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Produsen, Konsumen dan Satuan Tugas (SATGAS)
Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam Bidang Jaminan Produk Halal

A. Wawanacara Dengan Produsen

1. Sejak kapan menekuni usaha ini?
2. Produk apa saja yang anda diproduksi?
3. Apakah produksi dilakukan setiap hari?
4. Dalam sekali produksi menghasilkan berapa banyak?
5. Bahan apa saja yang digunakan pada produk tersebut?
6. dipasarkan kemana saja?
7. Apakah sudah mendapatkan surat ijin usaha produksi pada semua produknya?
8. Apakah sudah pernah mendaftarkan sertifikasi halal pada setiap produknya? Kenapa?
9. Apakah anda mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha mengenai kehalalan produk?
10. Apakah anda mengetahui adanya peraturan mengenai keharusan dicantumkan label halal pada produk?

B. Wawancara Dengan Pembeli/Konsumen

1. Apakah anda pernah membeli produk tanpa label halal?
2. Apakah anda pernah memperhatikan tentang kelengkapan informasi pada setiap produk yang anda beli?
3. Apakah anda tahu bahwa terdapat Undang-Undang yang mengatur keharusan adanya label halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia?
4. apakah anda pernah mendapatkan keterangan informasi dari produsen tentang kekurangan informasi yang terdapat dalam produknya?

5. Apakah anda pernah merasa keberatan dan melakukan komplain kepada para pelaku usaha/produsen mengenai kurangnya informasi dalam produknya?
6. Selama ini, pernahkan anda mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan tanpa label halal?

C. Wawancara Dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

1. Sejak kapan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 mulai berlaku? apakah dari mulai UU tersebut disahkan sudah mulai diterapkan peraturan tersebut kepada para pelaku usaha?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkhusus kepada para pelaku usaha agar implementasi dari UU No. 33 th 2014 berjalan dengan baik?
3. Apa sajakah yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap agar para pelaku usaha segera mendaftarkan produknya?
4. Bagaimana proses pendaftaran bagi para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sertifikat halal pada produknya?
5. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika ingin mendaftar sertifikasi halal?
6. Ruang lingkup usaha apa sajakah yang masuk dalam cakupan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 terkhusus pada makanan olahan Produk Industri Rumah Tangga?
7. Berapakah biaya pendaftaran yang dikenakan kepada produsen untuk mendaftar sertifikasi halal?
8. Bagaimana jika adapelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mendaftar sertifikasi halal karena dirasa mahal?
9. Bagaimana pengawasan BPJPH terhadap produk-produk yang wajib bersertifikat halal yang beredar di masyarakat?
10. Bagaimana jika ada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya padahal peraturan ini bersifat wajib? Apakah ada sanksi?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 20232
Telepon (024) 8412547 - 8412552 Faksimile (024) 8315418
Website www.jateng.kemrenag.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : **302/** /Kw.11.6/4/HM.01/04/2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **NANI NUR ASFIYAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **1502036050**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Perguruan Tinggi : **Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang**

Benar-benar telah melakukan Penelitian tentang Jaminan Produk Halal dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ungaran Barat dalam Perspektif Hukum Islam). Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu dari tanggal 17 sd 21 Pebruari 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan terima kasih.

Semarang, **9** April 2020
An. Kepala
Kepala Bidang Urais dan
Pembinaan Syariah
Selaku Koordinator
Layanan Sertifikat Halal
Jawa Tengah



Muh. Arifin

NIP. 196309141992031001

Tembusan Yth. :
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
(sebagai Laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. DAFTAR DIRI

Nama : Nani Nur Asfiah
TTL : Sosa, 25 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Ds. Trans Pir Sosa Unit VI, RT 03/01, Kec.
Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas, Medan
No. Telephon : 082313755108
Email : naninut11@gmail.com

2. PENDIDIKAN

- a) SDN 101920 Hutaraja Tinggi lulus tahun 2009
- b) MTs Al-Khoir Mananti lulus tahun 2012
- c) MA Sunan Pandanaran lulus tahun 2015
- d) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Mei 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nani Nur Asfiah', written in a cursive style.

Nani Nur Asfiah

1502036050